

Alat



KR-Saifullah Nur Ikhwan

Sidang perkara susur sungai yang menewaskan sejumlah siswa SMP di Turi, Sleman.

SK Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No 227 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan kebijakan manajemen pramuka. "Seharusnya para terdakwa selaku pembina pramuka melakukan survei lokasi,

minta izin ke Kamabigus, orangtua siswa, TNI/Polri dan SAR. Kemudian menyiapkan peralatan seperti tali, ban bekas, tongkat. Selain itu perlu menyiapkan alat keselamatan yaitu pelampung dan perahu

kecil, serta alat komunikasi dan alat kesehatan," terangnya.

Namun ternyata, dalam kegiatan susur sungai itu, para terdakwa tidak melakukan survei lokasi, tidak minta izin, tidak mempersiapkan peralatan, alat keselamatan, alat komunikasi maupun alat kesehatan. Sehingga pada saat siswa menyusuri sungai tidak dibekali pelampung, tali pengaman dan lainnya. "Para terdakwa tidak mempertimbangkan dari segi alat, segi petugas dan cuaca," paparnya.

Pada saat kegiatan, cuaca di lokasi mendung dan hujan. Sekitar pukul 15.00, para siswa mulai turun menyusuri sungai. Awalnya berjalan lancar dan sebagian regu sudah sampai finis dan ada yang naik

jembatan. Namun tiba-tiba datang air sangat deras menerjang para siswa yang berada di sungai.

"Atas peristiwa itu, sebanyak 10 siswa SMPN 1 Turi meninggal dunia. Atas kejadian itu, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 359 KUHP dan 360 (2) KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP," tegasnya.

Kuasa hukum terdakwa DDS Safudin SH mengaku tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut. Pihaknya nanti akan memperjuangkan sejauh mana tanggung jawab terdakwa ini dalam kegiatan susur sungai. "Terdakwa ini bertugas di finis dan mengambil foto siswa. Saat mengetahui kejadian tersebut, terdakwa langsung turun dan menolong siswa," kata Safudin. **(Sni)-d**

Sambungan hal 1

Selain

di kabupaten/kota di zona hijau, pemerintah daerah atau Kanwil/Kantor Kemenag memberi izin, satuan pendidikan penuh semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka, dan orang tua setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Jika pemerintah daerah memberikan izin, maka kepala sekolah harus berkoordinasi dulu dengan komite sekolah untuk membahas pembukaan sekolah. Namun jika sekolah dibuka, sekolah tidak bisa memaksa orang tua yang khawatir anaknya kembali ke sekolah.

"Itu hak orang tua, jika khawatir anaknya kembali ke sekolah. Sekolah tidak bisa memaksakan seluruh siswa kembali sekolah," terang dia.

Pembukaan sekolah pun dilakukan bertahap. Untuk bulan pertama, sekolah yang dibuka untuk jenjang SMA/MA/SMK dan SMP/MTS jumlahnya sekitar 2,2 persen peserta didik di zona hijau.

Bulan ketiga, selanjutnya sekolah dibuka untuk jenjang SD/MI dan SLB. Jumlahnya sekitar 2,9 persen dari peserta didik di zona hijau. Selanjutnya pada bulan kelima, sekolah untuk jenjang PAUD dan nonformal dibuka. Jumlahnya sekitar 0,7 persen siswa di zona hijau. "Begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, maka satuan pendidikan wajib ditutup kembali," tegas dia.

Sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang melakukan pem-

belajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa normal baru dengan sejumlah ketentuan.

Sekolah yang dibuka wajib mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Mulai dari ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, kesiapan menerapkan area wajib masker, memiliki pengukur suhu tembak, pemetaan warga satuan pendidikan tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, dan membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan atau senat akademi perguruan tinggi terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

"Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau, berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan Kanwil atau Kantor Kemenag," kata dia lagi.

Proses pembelajaran di sekolah dilakukan dua fase yakni masa transisi (dua bulan pertama) dan kebiasaan baru. Sekolah harus mengikuti aturan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik di kelas untuk pendidikan dasar menengah.

Untuk SLB jaga jarak minimal 1,5 meter dan lima peserta didik per kelas. PAUD jaga jarak minimal tiga meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

Sambungan hal 1

Mahasiswa

Riris menyatakan, dari hasil kajian epidemiologi baik *reproductive rate* atau *effective reproductive rate* itu merupakan sesuatu yang sifatnya bisa fluktuatif. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peneuman kasus, tetapi secara umum jika dilihat trennya memang angka *reproductive rate effective*-nya di bawah 1 saat ini. "Kita harus melihat secara terus-menerus ada kenaikan atau tetap di bawah satu kalau bisa tetap di bawah satu, maka kasusnya bisa berhenti di Yogyakarta. Namun yang jadi masalah, bukan kalau kasusnya berhenti kita sudah bebas, tetapi karena memang kita efektif melakukan tindakan *social distancing*," katanya.

Riris menekankan DIY sedang melakukan kesiapan memasuki kenormalan baru, sehingga risiko penularan virus Corona akan meningkat kembali karena secara faktual prevalensi kasus Covid-19 di DIY sebenarnya masih rendah. Ketika virus Corona masih bersirkulasi secara global dari waktu ke waktu, maka virus itu bisa datang ke DIY dan melakukan penyebaran lagi. Kondisi tersebut harus disadari masyarakat, bahwa masyarakat berhadapan dengan penyakit ini tidak hanya sekali saja, tetapi bisa jadi dalam

waktu dua atau tiga tahun kedepan. "Apabila pemerintah melakukan pelonggaran menggunakan kenormalan baru yang memperbolehkan masyarakat melakukan beberapa kegiatan dengan protokol kesehatan. Pengetatan ataupun pelonggaran *social distancing* di DIY harus tetap memperhatikan laju penularan virus Corona," imbuhnya.

Ahli Epidemiologi UGM ini menjelaskan, tes adalah salah satu kunci untuk menemukan kasus Covid-19 di DIY dengan swab atau Polymerase Chain Reaction (PCR) dan Rapid Diagnostic Test (RDT). DIY telah melakukan *screening* massal seperti klaster Indogrosir maupun pasar atau pusat-pusat keramaian. DIY akan memasuki era kenormalan baru atau kebiasaan baru di mana kebiasaan baru itu adalah memasukkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji menyatakan, sampai Senin (15/6) kampus-kampus di DIY belum ada yang memutuskan untuk mengadakan pertemuan/kuliah tatap muka. Untuk itu mahasiswa yang saat ini berada di luar daerah, sebaiknya kembali ke Yogyakarta,

apabila kuliah tatap muka sudah dimulai. Apabila kampus masih menggunakan kuliah dengan cara online atau daring, lebih baik apabila mereka mengikuti dari tempat tinggal masing-masing.

"Sampai saat ini kampus di DIY baik negeri maupun swasta masih memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Seandainya nanti sudah ada pembelajaran tatap muka. Bagi para mahasiswa lama maupun baru kami persilakan untuk datang ke Yogya. Konsekuensi dari itu, saya minta para mahasiswa sudah melakukan tes kesehatan di daerah masing-masing supaya kalau nanti terindikasi sakit, lebih baik istirahat dulu dan dirawat," jelas Baskara Aji.

Lebih lanjut Baskara Aji menambahkan, ?bagi para mahasiswa yang daerahnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mereka diminta untuk melakukan uji kesehatan terlebih dahulu di daerah masing-masing. Selain itu, begitu sampai ke DIY sebaiknya mahasiswa tersebut segera datang ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan kepastian tentang kesehatan. Setelah itu mereka diminta melakukan isolasi diri di tempat kost masing-masing. **(Ira/Ria)-a**

Sambungan hal 1

Zero

pemilih yang bisa berpengaruh pada kualitas Pilkada di 275 Daerah.

Narasi besar yang mesti dibangun adalah, esensi pilkada langsung, sebagai instrumen yang dipakai untuk memperoleh patron yang jujur, amanah, dan ikhlas melayani rakyat. Apakah iya, pemilihan kepala daerah secara langsung, merupakan manifestasi Demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi mekanis-formal yang mengukur kualitas demokrasi sesuai hasil polling/survei dan indeks demokrasi tiap negara. Itu semua, bisa *by order* atau *by desgin*. Kepatuhan terhadap asas-asas kepelimulan-pun tidak cukup, mewakili esensi kita dalam berdemokrasi Pancasila.

Pancasila merupakan hasil ekstraksi nilai spiritual dan kultur bangsa. Dan, melampaui esensi demokrasi liberal yang sesak dengan paham individualis, hukum pasar, dan menjaga jarak dengan agama. Demokrasi Pancasila lebih menaruh atensi besar pada patron yang jujur dan bermoral. Instrumen yang dipakai untuk menghasilkan patron-pun, harus berintegritas. Pilkada merupakan produk impor

demokrasi liberal yang telanjur diadungkan sebagai pilihan terbaik sejak 2005 silam. Padahal, tidak sama sekali. Agak sulit menjustifikasi, bahwa pilkada langsung lebih beradab dan berperikemusiaan.

Para pemegang modal dengan mudahnya menentukan siapa yang berhak jadi kepala daerah. Kekuatan duit menjadi prasyarat utama. Banyak kepala daerah pada akhirnya tersandera dengan kepentingan investor politik yang memodalinya.

Momentum pandemi dan Hari Pancasila tahun ini, menjadi saat yang tepat untuk meneguhkan pilkada berbasis Demokrasi Pancasila. Kita kaya, dengan model sukses pemimpin lokal yang berpijak pada nilai adat-istiadat, terpelihara secara turun-temurun. Sistemnya cukup sederhana, penuh kekeluargaan, dan rasa saling percaya. Sayangnya, hanya menjadi fosil sejarah dan legal artefak. Akibat tidak dipatenkan dalam produk kebijakan negara. Saatnya Pilkada langsung dievaluasi. Pertama, kembali ke model DPRD. Selain ongkos dan mahar politiknya bisa ditekan, juga lebih merepresentasikan sistem 'permusyawara-

tan perwakilan'. Mudaratnya lebih sedikit, ketimbang Pilkada langsung. Tinggal instrumen pengawasan dan penyelesaian konflik diperkuat. Kedua, penerbitan Perpu penundaan Pilkada 2020, digeser pada tahun 2021, dengan opsi pemilihan cukup dilakukan DPRD. Ketiga, Pasca-2021, segera disiapkan UU *lex specialis* yang menghapuskan sistem pilkada langsung, dan mengembalikan model pemilihan berbasis kearifan lokal.

Filosofi édiplih secara demokratisif pada Pasal 18 UUD 1945, lebih terintegrasi pada prinsip 'permusyawaratan perwakilan'. Begitu pula, otonomi daerah tidak boleh berhenti pada politik desentralisasi asimetris. Mestinya pilkada asimetris juga dibuka ruang, yang berbasis kultur lokal dan berlaku seluruh Indonesia.

Dengan begitu, kita kembali menemukan jati diri Demokrasi Pancasila yang selama ini mati suri. Akibat pilkada langsung yang notabene adalah demokrasi impor.

(Penulis adalah *Staf Pengajar Tata Negara UMY, Direktur Legal Empowerment and Democracy (LEAD) Indonesia-d*

Pandemi, Pick Up Suzuki Tetap Berjaya

YOGYA (KR)

Pandemi Covid-19 nyaris berdampak hampir di semua sektor termasuk industri otomotif. Meski begitu, kurun waktu sejak pertengahan Maret, Suzuki Pick Up New Carry ternyata tetap berjaya.

Rizki Indriananta, General Manager Sumber Baru Mobil (SBM), Senin (15/6) menyampaikan, pengaruh pandemi Covid-19 pada penjualan tipe pick up hanya mengurangi 30 persen penjualan rata-rata tiap bulan. Penyebabnya, ketika banyak masyarakat melakukan gerakan *work from home* (WFH), jasa pengiriman logistik meningkat. Dan penjualan pick up masih bisa disebut ada pertumbuhan.

Ini artinya pick up New Carry tetap banyak diminati. "Meski pandemi, para pengusaha tetap membutuhkan kendaraan un-



KR-Istimewa

Suzuki New Carry diminati pelaku UMKM.

tuk operasional nianya," jelas Rizki. "Memang penjualan turun 70 persen, tetapi disokong lembaga pembiayaan yang memberi dukungan pada merek Suzuki, kami masih bisa eksis," paparnya.

Meskipun total pembayaran konsumen ada penyesuaian, ternyata minat konsumen ke merek Suzuki terutama tipe PU low masih sangat diminati dengan share 80 persen ke atas.

"Pick up masih banyak permintaan dari pelaku UMKM untuk mengantarkan sembako, sayur, telur, air mineral keliling, juga gas. Angkutan sampah juga banyak memakai pick up," papar Rizki. Seri pick up terlaris terutama varian New Suzuki Carry Pick Up Futura 1.5. Sementara untuk tipe XL 7, pada Mei lalu merajai berdasarkan resume penjualan Mei 2020 khusus DIY," tutupnya. **(Sal)-d**

Ajak

birokrasi cerdas, karena digerakkan oleh mesin imajinasi manusia," terang Sultan.

Raja Kraton Yogyakarta itu menambahkan, proses perubahan itu harus dilakukan secara cepat disertai kecerdasan. Karena jika terlalu lama menjalani proses dan berlaku bimbang, dikhawatirkan bisa menjadi pecundang. Karena itu, harus dilakukan perubahan secara radikal terhadap birokrasi agar tidak birokratis, tapi inovatif, aplikasi dari simbol 'Satriya' yang tersemat di dada, meski perubahan itu pun harus dilakukan di tengah lomba itu sedang berlangsung.

"Gambaran birokrasi yang melayani, bentuknya ramping, proaktif, responsif, partisipatis. Selain itu sarat empati dan mudah bergerak cepat untuk hadir di tengah masyarakat, membangun relasi, bermitra mencari solusi. Hidupkanlah mesin birokrasi sebagai aktor perubahan dan insan peradaban yang melayani," ungkap Sultan.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dr Bambang Cipto MA berharap, Pemda DIY dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terutama kepada masyarakat DIY khususnya kalangan generasi muda yang masih bersemangat di masa pandemi Covid-19 serta menyongsong era kenormalan baru. Di samping itu, Pemda juga harus memperhatikan pelayanan kepada masyarakat miskin di DIY karena merekalah yang sangat terdampak pandemi virus Corona.

"Seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19 harus benar-benar diperhatikan oleh Pemda, karena ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Dalam hal ini, birokrasi di lingkungan Pemda DIY harus benar-benar fokus dalam memberikan

Sambungan hal 1

pelayanan kepada masyarakat terdampak virus Corona tersebut," kata Bambang.

Bambang menyampaikan, bagi ASN di lingkungan Pemda DIY seharusnya memahami betul kondisi di DIY terlebih dahulu. Jika mereka telah memahami situasi dan kondisi di DIY, maka apabila terjadi sesuatu bisa cepat bertindak mengambil keputusan. Contohnya seperti orang-orang yang terpaksa dikarantina atau isolasi harus diperhatikan dan dibantu sehingga tetap dilayani secara optimal.

"Minimal jangan sampai ada masyarakat terdampak Covid-19 yang lepas dari perhatian birokrasi pemerintah. Karena kasihan mereka jika tidak diperhatikan dan dibantu dengan baik," ujarnya.

Guru Besar Jurusan Hubungan Internasional UMY tersebut menggarisbawahi, birokrasi dalam menawarkan bantuan jangan sampai menimbulkan kebingungan karena warga itu jumlahnya banyak dan bermacam-macam. Jika kebijakan pemerintah sampai multiinterpretasi atau bisa disimpulkan bermacam-macam, maka masyarakat yang tidak bisa memahami akan menabraknya. Sehingga birokrasi harus jelas dan satu sumber agar menjadi acuan bagi masyarakat dan tidak perlu memikirkan hal lainnya.

"Mudah-mudahan pemerintah memperbanyak media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga mudah diakses dan dilihat, serta jika ada perubahan dapat segera diketahui. Masyarakat DIY tidak akan gamang memasuki era kenormalan baru, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan apabila pemerintahnya aktif," pungkas Bambang.

(Ria/Ira)-a

Zona

Di Kota Semarang misalnya, ia masih melihat banyak orang berkerumun, tanpa jarak dan tidak memakai masker.

"Kemarin saya sepedaan di Kota Lama dan Simpanglima. Wah itu luar biasa. Mereka ada event saja. Ini kan bahaya. Makanya akan saya buat surat khusus agar kegiatan-kegiatan itu dibatasi bahkan diperketat," ujar Ganjar.

Untuk daerah lain yang sudah kuning, Ganjar meminta semuanya tetap berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan penyebaran Covid-19 akan kembali terjadi. Untuk itu Gubernur Jateng minta seluruh bupati/walikota di Jateng melakukan persiapan-persiapan dan penataan khususnya di tempat publik. Pasar-pasar tradisional harus ditata agar penularan tidak terjadi.

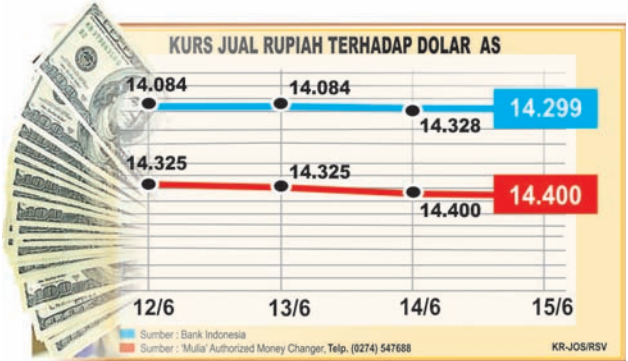
Gubernur minta seluruh pasar tradisional di Jateng ditata. Kalau perlu ditutup selama tiga hari untuk kemudian ditata jaraknya. Selain itu, harus ada petunjuk yang berjaya untuk mengamankan para pedagang dan pembeli dari penularan Covid-19 dengan pengawasan ketat protokol kesehatan.

Yang lebih penting lagi menurut Ganjar, seluruh bupati/walikota agar mening-

katkan *tracing* penyebaran Covid-19. Pencarian potensi penyebaran dengan *surveillance* harus diperbanyak untuk mengetahui seberapa besar masyarakat yang sudah yang tertular Covid-19.

"Saya minta laboratorium juga meningkatkan kapasitasnya. Kalau biasanya hasil lab tiga hari jadi, saya minta sehari sudah bisa selesai dan bisa diketahui hasilnya. Saya minta semua lab *on* selama 24 jam untuk keperluan ini," tegasnya.

Tim Ahli Gugus Tugas Covid-19 Jawa Tengah



Prakiraan Cuaca Selasa, 16 Juni 2020					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dimi Hari	Suhu °C
Bantul					23-32
Sleman					23-31
Wates					23-32
Wonosari					23-32
Yogyakarta					23-32
Cerah					
Berawan					
Udara Kabur					
Hujan Lokal					
Hujan Pelir					